

## **Hubungan Pemberdayaan Wanita dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Usia Subur (15-49 tahun) yang telah Menikah di Indonesia: Analisis SDKI 2017**

Muthiah, Triska Alya

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=135643&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Latar Belakang: Indonesia menghadapi permasalahan penduduk berupa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan total fertility rate (TFR) yang lebih besar dari rata-rata ASEAN dan TFR ideal suatu negara. Penggunaan kontrasepsi, khususnya MKJP, merupakan salah satu bentuk terlaksananya program Keluarga Berencana. Namun berdasarkan hasil SDKI 2017, hanya terdapat 13,4% penggunaan MKJP. Terlihat pula bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh pengguna wanita dibandingkan pria, terutama pada MKJP yaitu 13,2% diantaranya merupakan pengguna wanita dan hanya 0,2% adalah pengguna pria. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan wanita dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang telah menikah di Indonesia berdasarkan analisis data SDKI 2017.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dan menggunakan data sekunder (data SDKI 2017). Variabel dependen penelitian ini adalah penggunaan MKJP dengan variabel independen utama adalah pemberdayaan wanita. Analisis deskriptif, bivariat dan stratifikasi digunakan untuk melihat gambaran tiap variabel dan mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dan mengetahui variabel perancu antara hubungan tersebut. Hasil: Wanita yang berdaya memiliki risiko 1.15 [95% CI=1,03-1,27] kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP daripada wanita yang tidak berdaya. Diketahui bahwa variabel pendidikan wanita dan indeks kekayaan rumah tangga merupakan variabel perancu pada hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP. Kesimpulan: Penggunaan MKJP yang masih rendah merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi instansi pemerintahan untuk mengembangkan kesehatan dengan berfokus pada peran wanita.

**Background:** Indonesia faces population problems such as a high number and rate of population growth with a total fertility rate (TFR) which is bigger than ASEAN average and ideal standard of TFR. The utilization of contraception, especially LAPMs, is one of program to ensure the implementation of family planning program. However, based on the results of the 2017 IDHS, there was only 13.4% of women used LAPMs. And from year to year, the utilization of contraception in Indonesia is still dominated by female users compared to men, especially in MKJP, namely 13.2% of them are female users and only 0.2% are male users. This study aims to examine the association between women's empowerment and the utilization of long-acting and permanent contraceptive (LAPMs) among married women aged 15-49 years in Indonesia based on analysis of IDHS data 2017. **Methods:** This study was a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data (2017 IDHS data). The dependent variables of this study is the utilization of LACPMs with the main independent variables were women's empowerment. Descriptive, bivariate and stratified analysis were used to see the description of each variable and to examine the association between the dependent and independent variables and to examine the confounding variables between them. **Result:** Empowered women had 1.15 [95% CI=1.03-1.27] times higher risk of using MKJP

than powerless women. The result of this study also found that women's education and household wealth index are confounding variables in the association between women's empowerment and the utilization of LACPMs. Conclusion: The utilization of LACPMs which is low is one of the public health challenges in Indonesia. The association between women's empowerment and the utilization of LACPMs can be taken into considerations for government agencies to develop health by focusing on the role of women. </em>